



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

- tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68810);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

- Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.250.000.232.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.180.000.000.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh miliar rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp1.250.000.232.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah:
  1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp70.000.232.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
  2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp128.858.636.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.043.414.924.000,00 (satu triliun empat puluh tiga miliar empat ratus empatbelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp90.764.750.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp1.779.660.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp28.314.226.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empatbelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp990.121.580.700,00 (sembilan ratus sembilan puluh

- miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah); dan
- b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp53.293.343.300,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Hotel sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Pajak Restoran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - c. Pajak Hiburan sebesar Rp52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Pajak Reklame sebesar Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
  - f. Pajak Air Tanah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp70.980.000.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah); dan
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
  - j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
  - k. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)

#### Pasal 5

- Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bersumber dari:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.372.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp287.160.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah); dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bersumber dari:

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### Pasal 7

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bersumber dari:

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Jasa Giro Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Pendapatan Bunga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp 1.480.226.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- g. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- h. Pendapatan BLUD sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);

#### Pasal 8

Transfer pemerintah pusat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a bersumber dari :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp320.674.227.700,00 (tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp444.844.931.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp82.731.838.000,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp75.691.108.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah);
- e. Dana Insentif Daerah Rp13.921.767.000,00 (tigabelas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
- f. Dana Desa Rp52.257.709.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 9

Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp53.293.343.300,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf bersumber dari:

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 11

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional sebesar Rp910.520.715.705,00 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus limabelas ribu tujuh ratus lima rupiah);
- b. Belanja Modal sebesar Rp208.858.403.395,00 (dua ratus delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- d. Belanja Transfer sebesar Rp120.621.112.900,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus duabelas ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 12

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp539.768.278.024,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp335.536.747.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja Subsidi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- d. Belanja Hibah sebesar Rp24.630.089.844,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan
- e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.985.600.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 13

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.339.200.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);



- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.263.983.910,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.199.510.610,00 (empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp132.269.078.875,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp709.150.000,00 (tujuh ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp77.480.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp312.219.022.077,00 (tiga ratus duabelas miliar dua ratus sembilanbelas juta dua puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp214.039.438.947,00 (dua ratus empatbelas miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp8.128.353.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp758.754.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp623.400.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah); dan
- f. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 16

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja Barang sebesar Rp65.869.180.692,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- b. Belanja Jasa sebesar Rp154.655.064.384,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

- c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.143.205.931,00 (sebelas miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp67.805.381.430,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.256.375.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp10.607.540.400,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah); dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp20.200.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 17

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada BUMN Rp141.120.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp21.436.650.963,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- d. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp1.002.880.000,00 (satu miliar dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp539.438.881,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

#### Pasal 18

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp1.015.000.000,00 (satu miliar limabelas juta rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp1.686.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah); dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp7.284.600.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 19

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu Belanja Modal Tanah Rp1.339.200.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 20

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp2.534.860.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp5.912.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus duabelas juta rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp8.574.723.300,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp846.990.380,00 (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp3.777.167.400,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp891.400.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp5.043.623.230,00 (lima miliar empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- i. Belanja Modal Alat Eksplorasi sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- j. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp656.000.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp1.378.219.600,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilanbelas ribu enam ratus rupiah); dan
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 21

Belanja Modal gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp38.822.064.069,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah); dan
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp4.377.446.541,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

#### Pasal 22

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp101.580.088.875,00 (seratus satu miliar lima ratus

- delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp16.464.500.000,00 (enambelas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp11.572.590.000,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp2.651.900.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 23

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp369.150.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp77.480.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 24

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas Belanja Bagi Hasil yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp4.707.760.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp725.137.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 25

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp115.188.215.900,00 (seratus limabelas miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus limabelas ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 26

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp70.000.232.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 27

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya Rp70.000.232.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 28

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Sosial yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bagi Hasil yang diterima serta SKPD Pemberi Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;  
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI



Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 396

LAMPIRAN 1  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 87 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN  
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	52.750.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.980.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	70.600.000.000,00
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	70.600.000.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.400.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.400.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.400.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.550.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	450.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	450.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.100.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.100.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.000.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	4.000.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	4.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.400.000.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	1.400.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	1.400.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.779.660.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.372.500.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.200.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.200.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	22.500.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	22.500.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	287.160.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	200.160.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	200.160.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	12.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	12.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	20.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	20.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	55.000.000,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	55.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	120.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	120.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	120.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.000.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.314.226.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	100.000.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	100.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.000.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.480.226.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.480.226.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.480.226.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	84.000.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	5.000.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	2.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	75.000.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	50.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	50.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	50.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	21.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.000.000.000,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.043.414.924.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	990.121.580.700,00
4.2.01.05	Dana Desa	52.257.709.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	52.257.709.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	52.257.709.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	13.921.767.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	13.921.767.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	13.921.767.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	320.674.227.700,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	174.067.215.896,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	143.926.973.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	28.674.131.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	1.446.337.896,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	19.774.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	146.607.011.804,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	80.181.310.804,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	58.790.730.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	354.523.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.000.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	7.260.448.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	444.844.931.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	332.626.205.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	332.626.205.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	112.218.726.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.241.884.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	39.948.786.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.068.145.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	36.559.911.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	158.422.946.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	82.731.838.000,00
4.2.01.09.01.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	6.856.511.000,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	30.479.826.000,00
4.2.01.09.01.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	24.459.048.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	454.900.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.156.444.000,00
4.2.01.09.01.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	6.023.295.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	12.090.000.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	899.922.000,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	311.892.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	75.691.108.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	36.764.871.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	571.750.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.620.576.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.278.089.000,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.046.542.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	15.241.090.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	663.750.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.186.328.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	299.780.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	81.870.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.400.772.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.293.343.300,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	53.293.343.300,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.293.343.300,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.560.279.799,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.411.821.680,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.383.836.335,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.408.028.871,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.529.276.615,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.726.440.000,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.726.440.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.726.440.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.726.440.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.726.440.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.180.000.000.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>910.520.715.705,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	539.768.278.024,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	312.219.022.077,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	226.957.957.077,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	170.033.362.077,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	56.924.595.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.926.803.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.323.007.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.603.796.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.447.440.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.447.440.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.045.945.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.045.945.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.915.723.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.474.185.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.441.538.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.664.790.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.556.275.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.108.515.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.175.509.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.320.536.000,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.855.973.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.676.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.275.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.401.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.623.062.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.984.936.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.638.126.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	489.282.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	352.659.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	136.623.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.467.835.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.057.980.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	409.855.000,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.500.000.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.500.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	214.039.438.947,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	54.017.964.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	50.785.272.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.232.692.000,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	4.414.428.000,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	3.660.924.000,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	753.504.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.776.752.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.011.212.000,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	765.540.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.769.120.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.733.576.000,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	35.544.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	104.193.680.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	94.294.760.000,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	9.898.920.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.867.494.947,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	36.764.871.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.620.576.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	571.750.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.820.617.947,00
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	64.680.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.128.353.000,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	62.512.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	62.512.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.524.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.524.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	39.660.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	39.660.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.371.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.371.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	65.736.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	65.736.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.000.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.000.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.550.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.550.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	480.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	480.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	59.736.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	59.736.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	156.524.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	960.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.856.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	102.708.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.321.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.321.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	200.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	200.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	758.754.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.314.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	232.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	232.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.581.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	578.552.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	578.552.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	623.400.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	250.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	250.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	373.400.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	373.400.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	3.699.310.000,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	3.699.310.000,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	3.699.310.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.536.747.837,00
5.1.02.01	Belanja Barang	65.869.180.692,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.864.380.692,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	252.000.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	23.008.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.008.168.920,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	73.115.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.658.813.290,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.384.161.150,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	4.000.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	4.003.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	150.140.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.440.584.742,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.341.159.384,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.982.368.408,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	887.193.792,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	581.853.720,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	412.808.210,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	917.838.400,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	476.860.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	46.840.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	151.430.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	124.564.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.111.255.080,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.132.718.480,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.401.922.200,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	71.000.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	263.648.016,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	52.848.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	80.127.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.781.849.200,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.228.253.200,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45.540.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	239.179.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.359.440.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	17.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.726.546.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	55.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	215.900.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	238.050.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	57.000.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.624.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.050.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	118.440.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	34.100.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	418.450.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	289.850.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.800.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	4.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	154.655.064.384,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.962.700.229,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	679.620.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	31.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.528.240.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.405.660.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	18.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.783.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	18.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	8.300.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	934.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.910.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.018.848.600,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	26.588.100,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.192.800.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	487.200.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	489.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	28.892.610.241,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.005.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.049.690.218,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.714.700.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	954.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	890.400.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	123.039.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	136.800.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	49.700.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.558.800.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	16.500.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	82.560.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	502.020.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	730.950.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	67.490.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	207.190.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.108.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.155.579.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	1.144.800.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	318.887.300,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.312.077.990,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.693.838.164,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	170.600.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.890.918.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	465.559.800,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	827.377.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.453.373.053,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.661.299.763,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	50.984.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	74.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.248.164.628,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.200.000.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.752.460.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.083.700.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.652.279.502,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	223.676.706,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	232.847.620,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	103.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.432.803.877,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	234.015.130,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	23.300.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.080.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	70.218.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.313.140.000,00
5.1.02.02.04.0071	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggunaan)	1.243.350.747,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	244.500.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	7.800.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.400.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	225.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	22.500.000,00
5.1.02.02.04.0444	Belanja Sewa Suara	4.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.149.066.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	857.400.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	314.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	300.222.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	19.200.000,00
5.1.02.02.05.0014	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	10.000.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	3.500.000,00
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	32.000.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	521.204.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	561.540.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	530.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	36.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	11.000.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.583.049.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	350.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	45.119.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	55.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	270.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	31.930.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	46.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	685.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	701.380.520,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	22.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	150.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata	329.380.520,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	30.000.000,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	30.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.463.900.130,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.033.200.130,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	43.200.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	350.500.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	37.000.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	42.000.000,00
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	42.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	6.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.143.205.931,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	122.000.000,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	50.000.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	72.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.326.266.275,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	17.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.056.209.890,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	584.989.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.000.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	465.945.100,00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	67.500.000,00
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	27.000.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	11.000.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	31.000.000,00
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	130.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	300.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	60.200.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	865.490.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	469.059.880,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.822.390,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	32.500.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	89.430.015,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	700.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	95.600.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7.400.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	90.970.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	17.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	78.850.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	399.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.223.822.778,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.335.609.867,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	350.000.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	538.959.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	45.000.000,00
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	15.000.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	500.000.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	179.121.421,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	19.900.550,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	4.000.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	26.231.940,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.471.116.878,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	490.000.000,00
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	185.000.000,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	440.000.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	16.217.530,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	129.899.348,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	67.805.381.430,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.805.381.430,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.449.525.959,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.655.476.471,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	578.379.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	122.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.256.375.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.967.575.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	342.875.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	187.500.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.654.800.000,00
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	782.400.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.288.800.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.463.800.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	825.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	10.807.540.400,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	9.663.750.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	9.000.000.000,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	663.750.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	709.010.400,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	679.010.400,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	234.780.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	234.780.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.200.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.200.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.200.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	600.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	600.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	600.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	24.630.089.844,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.510.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.510.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.510.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN	141.120.000,00
5.1.05.03.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	141.120.000,00
5.1.05.03.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	141.120.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.436.650.963,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.996.042.963,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.996.042.963,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.713.646.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.393.848.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.319.800.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.726.960.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.726.960.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	1.002.880.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.002.880.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.002.880.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	539.438.881,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	539.438.881,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	539.438.881,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.985.600.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.015.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.015.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.015.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.686.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.686.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.686.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.284.600.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.284.600.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.284.600.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>208.858.403.395,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.339.200.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.339.200.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	999.200.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	700.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	239.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	400.000.000,00
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	400.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.263.983.910,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.534.860.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.500.360.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	2.500.360.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	34.500.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.500.000,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	29.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.912.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.909.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.922.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	900.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	367.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.720.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.000.000.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.000.000.000,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.000.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.574.723.300,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	988.476.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	25.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	119.400.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	844.076.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.714.667.300,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.325.000.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	141.400.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	700.748.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.323.319.300,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	221.700.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	871.580.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	136.500.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	60.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	435.380.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	12.000.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	68.800.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	158.900.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	846.990.380,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	822.990.380,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	805.990.380,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	12.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	15.000.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	9.000.000,00
5.2.02.06.04.0003	Belanja Modal Distance Measuring Equipment (DME)	9.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.777.167.400,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.655.287.400,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	377.646.400,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	477.621.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	300.000.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.500.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	121.900.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	121.900.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	891.400.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	36.400.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	36.400.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	855.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	855.000.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00
5.2.02.08.04.0004	Belanja Modal Recorder Display	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.043.623.230,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.622.473.230,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.125.061.430,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	497.411.800,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	421.150.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	357.250.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	38.900.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.000.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	149.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	149.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	149.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	656.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	636.000.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	636.000.000,00
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	20.000.000,00
5.2.02.18.03.0001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	20.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	1.378.219.600,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.200.000.000,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.200.000.000,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	113.219.600,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	113.219.600,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	65.000.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	65.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.199.510.610,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	38.822.064.069,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.293.323.944,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.378.807.940,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.221.175.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	174.630.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.750.150.204,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	985.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.514.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.959.411.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	124.000.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	837.753.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	750.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	598.396.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.528.740.125,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	1.147.160.000,00
5.2.03.01.02.0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	5.339.580.125,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	42.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasif	4.377.446.541,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.377.446.541,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	144.266.041,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	4.208.180.500,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	25.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.269.078.875,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	101.580.088.875,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	98.687.088.875,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	63.086.354.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	35.600.734.875,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.893.000.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	2.893.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	16.464.500.000,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	13.669.500.000,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	13.669.500.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	150.000.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	150.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.645.000.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.645.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	11.572.590.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	660.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	660.000.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	10.912.590.000,00
5.2.04.03.09.0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	10.912.590.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.651.900.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	212.000.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	212.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.409.900.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.409.900.000,00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	30.000.000,00
5.2.04.04.03.0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	30.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	709.150.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	20.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	20.000.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	20.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	320.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	170.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	170.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	150.000.000,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	150.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	369.150.000,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	368.900.000,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	368.900.000,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	250.000,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	250.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	77.480.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	77.480.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	77.480.000,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	13.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	64.480.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>120.621.112.900,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.707.760.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.707.760.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.707.760.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	725.137.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	725.137.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	725.137.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.188.215.900,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	115.188.215.900,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	62.930.506.900,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	62.930.506.900,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.257.709.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	52.257.709.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.250.000.232.000,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-70.000.232.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.232.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.000.232.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	70.000.232.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	70.000.232.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	70.000.232.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

